



Implementasi Tugas Pokok Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Perburuan Liar (Studi Pada Kawasan Taman Nasional Wasur Wilayah III Kabupaten Merauke)

Muhammad Firmansyah

¹ Universitas Musamus Merauke, Jl. Kamizaun, Mopah lama, Kabupaten Merauke, Papua 99611, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the main duties of the Forestry Police in combating wildlife poaching within the Wasur National Park Area III, Merauke Regency. The research adopts a qualitative approach with a case study method and applies George C. Edwards III's policy implementation theory, which consists of four key indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results indicate that the implementation of the Forestry Police's duties has not been fully optimal due to limited personnel, inadequate operational facilities, and weak coordination with local communities and relevant institutions. Additionally, law enforcement practices that lack sensitivity to local cultural values pose further obstacles to effective policy implementation. These findings highlight the need for strengthening institutional capacity, enhancing community participation, and utilizing monitoring technology to support the sustainable protection of biodiversity.

Keywords: Policy Implementation; Forestry Police; Wasur National Park.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas pokok Polisi Kehutanan dalam menanggulangi perburuan liar di kawasan Taman Nasional Wasur Wilayah III Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai acuan, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan belum berjalan secara maksimal akibat terbatasnya jumlah personel, minimnya fasilitas operasional, serta lemahnya koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Selain itu, pendekatan hukum yang tidak sensitif terhadap budaya lokal menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan di lapangan. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi pemantauan untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Polisi Kehutanan; Taman Nasional Wasur.

¹ CORRESPONDENCE AUTHOR: firmaryah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.1234/jpdi.v2i1.180>

© Licence Holder of, Papsel Research Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Pengantar

Keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya satwa liar berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan yang ditandai dengan banyaknya populasi spesies yang mengalami kepunahan. Kepunahan tersebut diakibatkan adanya pemanfaatan terhadap satwa semakin masif bersamaan dengan perkembangan IPTEK, tingkat ekonomi masyarakat, dan arus informasi. Pemanfaatan tersebut seringkali bersifat eksploitatif sehingga beberapa spesies menjadi punah atau terancam punah (Yossyafaat, 2023).

Pidana berat dipandang perlu diterapkan karena kehancuran atau punahnya salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang akan mengakibatkan dampak negatif yang fatal bagi penduduk, yang nilainya tidak dapat diukur secara materiil dan kondisinya tidak mungkin dipulihkan ke keadaan semula. Mengingat unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berkaitan, serta pemanfaatannya saling mempengaruhi sehingga kehancuran dan kepunahannya dapat mengganggu ekosistem, maka diperlukan pengaturan dalam pemanfaatan dan perlindungan ekosistem (Kolang Gede Pramantara, 2022)

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi adalah Taman Nasional Wasur, yang terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Taman Nasional Wasur dengan luas 431.425.12 Ha memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang luar biasa, terutama dari segi flora dan fauna. Karena ekosistem dataran rendahnya yang konsisten antara flora dan fauna di sekitarnya, menjadikannya salah satu kawasan konservasi di wilayah timur Indonesia. Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Wasur dengan luas 205.964.82 Ha dengan berbagai keanekaragaman hayatinya menjadi target utama bagi aktivitas perburuan liar yang mengancam kelestarian ekosistem di wilayah ini. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta tindakan yang bertentangan dengan peraturan perlindungan tumbuhan dan satwa liar, dapat dikenakan pidana yang berat berupa hukuman penjara dan denda (Kolang Gede Pramantara & Widyantra, 2022).

TN Wasur dikenal sebagai “Serengeti-nya Papua” karena keanekaragaman satwa liar yang hidup di dalamnya, termasuk spesies endemik seperti kanguru pohon, kasuari, dan berbagai jenis burung air yang bermigrasi secara musiman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, TN Wasur menghadapi ancaman serius dari aktivitas perburuan liar, khususnya di Wilayah III pengelolaan TN Wasur yang meliputi Wasur, Rawabiru, Distrik Sota dan sekitarnya. Wilayah ini memiliki akses jalan yang cukup terbuka, dekat dengan perbatasan negara, serta minim pengawasan rutin, sehingga menjadi lokasi strategis bagi pelaku perburuan satwa dilindungi (Putra et al., 2024). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi juga melibatkan jaringan pelaku dari luar daerah yang memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan dan hukum.

Secara normatif, tugas dan kewenangan Polhut diperkuat oleh dua regulasi utama. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan dasar hukum bagi tindakan preventif dan represif terhadap perusakan hutan, termasuk perburuan liar. UU ini mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku, termasuk pemanfaatan hasil hutan dan satwa secara ilegal. Sementara itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem menegaskan pentingnya integrasi antara konservasi, perlindungan kawasan, dan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun, implementasi tugas Polisi Kehutan di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Penelitian oleh (Putra et al., 2024) menunjukkan bahwa keterbatasan personel, minimnya sarana operasional seperti kendaraan dan peralatan patroli, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengamanan kawasan di Taman Nasional Bukit Duabelas. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan Polhut dalam melakukan deteksi dini dan penindakan terhadap aktivitas perburuan liar. Situasi ini memiliki kemiripan dengan kondisi lapangan di Taman Nasional Wasur Wilayah III, yang juga menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sulitnya akses ke titik-titik rawan perburuan.

Polisi Kehutan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus tersebut. Berdasarkan hasil data observasi awal yang peneliti dapatkan dari Balai Taman Nasional Wasur, tercatat dari tahun 2022 – 2024 ditemukan ada kasus perburuan liar yang melibatkan aktivitas ditemukannya bekas hewan yang terkena jerat dan juga laporan masyarakat terkait pemburuan satwa dilindungi yang mengalami peningkatan di wilayah SPTN wilayah III Wasur kabupaten Merauke.

Table 1. 1 Kasus Perburuan Liar

Tahun dan Jumlah Kasus Perburuan Liar	Hewan Yang Diburu	Metode Perburuan
2022 (2 Kasus)	Rusa	Masyarakat berburu dengan cara menembak menggunakan senjata api
2023 (9 Kasus)	Rusa dan Kangguru	Masyarakat berburu dengan cara menembak menggunakan senjata api dan jerat
2024 (9 Kasus)	Rusa dan Kangguru	Masyarakat berburu dengan cara menembak menggunakan senjata api

Sumber : Laporan SPTN Wilayah III Taman Nasional Wasur

Terkait tindakan memburu satwa liar telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan dasar hukum bagi tindakan preventif dan represif terhadap perusakan hutan, termasuk perburuan liar. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa perburuan, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks perlindungan hutan, Kementerian Kehutan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutan, yang memberikan landasan hukum dan pedoman konkret bagi upaya penegakan hukum di wilayah kehutan. Polisi kehutan di Taman Nasional Wasur sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang melindungi dan melaksanakan pengamanan hutan, tumbuhan dan satwa liar. Pangkal dasar SDA tersebut wajib terlindungi, terpelihara, lestari dan dipergunakan efektif untuk sejahteranya masyarakat Indonesia spesifiknya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin kesesuaian dan keseimbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran polisi kehutan sebagai upaya

untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Menteri Kehutan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutan. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perburuan liar dan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut, penelitian ini dipandang strategis untuk mengeksplorasi mekanisme penegakan hukum dan upaya pencegahan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut dalam menanggulangi perburuan liar di kawasan Taman Nasional Wasur Wilayah III Kabupaten Merauke, dengan fokus pada berbagai spesies satwa yang dilindungi.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori yang peneliti gunakan dalam penelitian “Implementasi Tugas Pokok Polisi Kehutan Dalam Menanggulangi Perburuan Liar (Studi pada Kawasan Taman Nasional Wasur wilayah III Kabupaten Merauke)” adalah dengan menggunakan teori keberhasilan implementasi menurut George C. Edwards III dalam (Pramono, 2020), yang juga memiliki beberapa indikator yaitu :

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selainitu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan informasi, tetapi juga pada sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan mencakup sumber daya manusia, seperti kompetensi pelaksana, serta sumber daya finansial.

c. Disposisi

Disposisi dalam konteks ini merujuk pada sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Disposisi yang dimiliki oleh pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, yang berperan sebagai organisasi pelaksana kebijakan, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik, diperlukan prosedur operasional standar (Standard Operational).

3. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran polisi kehutan dalam menanggulangi perburuan liar di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian berdasar kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antar variabel satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan

sebuah program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini secara kasar digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi (Fiantika et al., 2022: 86).

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Moloeng, (2007:6) dikutip dalam (Fiantika et al., 2022: 89) adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskriptif. Entah dalam bentuk kata kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi dalam menanggulangi perburuan liar dan hambatan yang dilakukan dan dialami oleh polisi kehutanan dalam menanggulangi perburuan liar di Kabupaten Merauke.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Balai Taman Nasional Wasur karena data-data yang akan diperoleh ditempat tersebut dapat memenuhi syarat dalam penelitian. Lokasi penelitian mudah terjangkau serta pertimbangan waktu, dana, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat memenuhi standar kualifikasi sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data. Informan dalam penelitian ini dibagi kedalam 3 pihak yaitu pihak Balai Taman Nasional Wasur, pihak polisi kehutanan, dan juga pihak dari masyarakat sekitaran kawasan Wasur. Pemilihan informan tersebut yaitu dengan menggunakan teknik Purposive Sampling karena orang-orang tersebut membidangi hal-hal yang akan ditanyakan dan masyarakat yang sering melakukan perburuan.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan harus dilakukan analisis data untuk mendapat kesimpulan dari hasil pengumpulan data tersebut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, melukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani et al., 2020:162).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian pembahasan ini peneliti ingin menginterpretasikan hasil pembahasan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan instrumen indikator yang di teliti terkait Implementasi Tugas Pokok Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Perburuan Liar di Kawasan SPTN III Wilayah Wasur Kabupaten Merauke.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu hal yang penting dan harus ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut bisa dijalankan atau dilaksanakan secara efektif. Komunikasi yang di maksudkan oleh George C Edward III ini adalah sehubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Komunikasi memiliki peran penting dalam menyampaikan tujuan dan sasaran sebuah kebijakan agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, potensi terjadinya kesalahpahaman atau penolakan terhadap kebijakan dapat diminimalisir (Laary et al., 2022). Indikator dari komunikasi ini berkenaan dengan melihat sejauh mana informasi, instruksi, dan koordinasi antara pihak terkait telah berjalan secara efektif dalam

pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator komunikasi menunjukkan bahwa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara aparat Polisi Kehutanan dan masyarakat secara umum telah terbina dengan baik melalui pendekatan kekeluargaan dan kegiatan anjungsana. Selain itu, Informasi terkait larangan perburuan dan perlindungan satwa disampaikan tidak secara formal, tetapi melalui pendekatan adat dan budaya. Peran Mitra Polhut juga sangat membantu dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan petugas. Namun demikian, penyampaian informasi belum sepenuhnya merata karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara jelas prosedur pelaporan perburuan liar. Ini menunjukkan bahwa indikator komunikasi sebagian besar telah terpenuhi, namun masih membutuhkan penguatan di aspek distribusi dan keterbukaan informasi. Dalam perspektif teori George C. Edwards III, komunikasi yang tidak tersampaikan secara efektif dapat menyebabkan kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh target sasaran, sehingga tujuan kebijakan yang dalam hal ini penanggulangan perburuan liar tidak tercapai secara optimal.

b. Sumber Daya

Salah satu syarat utama agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik adalah adanya penguasaan terhadap sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III yang menyatakan bahwa kekurangan sumber daya dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi dua aspek penting, yaitu: (1) sumber daya manusia, yang berkaitan dengan jumlah dan kualitas pelaksana kebijakan; dan (2) sumber daya keuangan, yang mencakup kecukupan dana, serta dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pelaksanaan kebijakan tersebut (Laary et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator sumber daya menunjukkan bahwa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya baik dari segi jumlah personel maupun sarana prasarana, masih menjadi kendala utama. Idealnya, jumlah Polhut tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi. Fasilitas seperti GPS, kendaraan patroli, serta alat dokumentasi masih sangat terbatas, dan sebagian besar petugas menggunakan perlengkapan pribadi. Meskipun petugas tetap menjalankan tugas dengan komitmen tinggi, keterbatasan ini berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Walaupun ada keterlibatan masyarakat melalui Mitra Polhut, namun dukungan pelatihan dan fasilitas bagi mereka juga masih terbatas. Oleh karena itu, Hal ini menunjukkan bahwa indikator sumber daya belum terpenuhi secara memadai. George C. Edwards III menyebutkan bahwa sebaik apa pun isi dari kebijakan, tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Sumber daya mencakup dua aspek, yaitu sumber daya manusia (personel) dan sumber daya non-manusia (sarana, prasarana, dan dana).

c. Disposisi

Menurut teori Edward III, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian antara keinginan pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Jika para pelaksana tidak sejalan atau memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan menjadi lebih rumit. Dalam hal ini, Edward III menekankan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor krusial ketiga dalam implementasi kebijakan. Disposisi ini mencakup sejauh mana

para pelaksana memiliki komitmen, konsistensi, dan integritas dalam menjalankan kebijakan dengan cara yang tepat, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan nilai-nilai demokratis (Laary et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator Disposisi menunjukkan bahwa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa petugas Polhut menunjukkan komitmen, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang tinggi. Para petugas Polisi Kehutanan menunjukkan sikap yang cukup responsif dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Mereka tetap menjalankan patroli meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan kondisi lapangan yang berat. Pendekatan persuasif lebih diutamakan kepada masyarakat adat dan juga Pendekatan non-litigasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan awal kepada masyarakat pelanggar, dan hanya kasus tertentu yang dilanjutkan ke ranah hukum. Sikap adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat menunjukkan bahwa para pelaksana menjalankan tugasnya secara profesional dan humanis. Dengan demikian, indikator disposisi telah terpenuhi dengan baik. Sikap yang adaptif dan fleksibel ini sejalan dengan teori Edwards bahwa pelaksana dengan disposisi yang baik akan berusaha sekuat tenaga menjalankan kebijakan, meskipun menghadapi kendala dari faktor lain seperti sumber daya atau birokrasi.

d. Struktur Birokrasi

George C. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan faktor penting keempat dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur ini mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme kerja berupa prosedur operasional standar (SOP) dan sistem pembagian tugas dalam organisasi. Menurutnya, meskipun para pelaksana kebijakan sudah memahami tugas mereka, memiliki sikap yang mendukung, serta sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tetap bisa terhambat jika struktur birokrasi yang ada terlalu rumit atau kaku. SOP yang efektif seharusnya menjadi pedoman yang jelas, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, agar dapat membantu pelaksana menjalankan kebijakan dengan lancar tanpa kebingungan (Laary et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan bahwa Struktur birokrasi secara formal telah terbentuk dengan baik, mulai dari kepala balai, kepala wilayah, resort, hingga pelaporan ke PPNS dan Gakkum. Pembagian wilayah kerja sudah jelas secara administrative dan juga SOP penanganan perburuan liar juga sudah tersedia dan dipahami oleh petugas. Namun, pelaksanaan birokrasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Masyarakat merasa struktur yang ada belum memudahkan mereka untuk melapor atau berkoordinasi. Mereka lebih sering menyampaikan masalah lewat Mitra Polhut atau kepala kampung karena tidak tahu harus ke mana atau tidak ada kantor petugas di sekitar kampung mereka. Walaupun secara sistem struktur birokrasi sudah dibentuk, kenyataannya belum berjalan maksimal karena banyak kantor yang tidak aktif dan belum ada tempat pengaduan yang dekat dan mudah diakses. Dengan demikian, indikator struktur birokrasi belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini selaras dengan teori Edwards yang menyatakan bahwa birokrasi yang tidak efektif akan menjadi penghambat serius dalam implementasi kebijakan. Struktur yang sudah baik secara dokumen administrasi, namun tidak didukung oleh fasilitas, kecepatan pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas lembaga, tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kawasan SPTN III Wilayah Wasur, dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas pokok Polisi Kehutanan dalam menanggulangi perburuan liar belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun para petugas telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, dan belum maksimalnya akses pelaporan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

Dilihat dari sisi komunikasi, Indikator komunikasi telah berjalan cukup baik, dengan pendekatan kekeluargaan dan budaya lokal yang diterapkan oleh petugas Polhut. Informasi mengenai aturan perburuan disampaikan melalui sosialisasi dan peran Mitra Polhut sebagai penghubung. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya merata karena masih ada masyarakat yang belum memahami prosedur pelaporan perburuan liar. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan baik, tetapi aspek distribusi dan keterbukaan informasi masih perlu diperkuat.

Selain komunikasi, aspek sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengawasan polhut. Dalam hal ini, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, hingga dukungan operasional. Petugas tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan perlengkapan pribadi, namun secara umum keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan menunjukkan bahwa indikator sumber daya belum terpenuhi secara maksimal.

Kemudian dari sisi disposisi atau sikap pelaksana, Polisi Kehutanan menunjukkan sikap yang profesional, responsif, dan berkomitmen tinggi. Mereka tetap menjalankan tugas dengan pendekatan humanis dan menghormati nilai-nilai adat masyarakat. Penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap, mulai dari pendekatan persuasif hingga pelaporan ke ranah hukum jika kasusnya berat. Ini menunjukkan bahwa indikator disposisi telah terpenuhi dengan baik.

Indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa secara formal struktur organisasi dan SOP sudah tersedia dan dipahami oleh petugas. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti tidak berfungsinya beberapa kantor resort dan belum meratanya akses masyarakat terhadap tempat pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator struktur birokrasi belum berjalan secara maksimal.

Dari keempat dimensi implementasi menurut George C. Edwards III, ditemukan bahwa faktor disposisi pelaksana tergolong sangat baik. Petugas Polhut menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya. Faktor komunikasi juga berjalan cukup baik, terutama melalui pendekatan budaya. Namun, dua dimensi lain yaitu sumber daya dan struktur birokrasi menjadi hambatan paling signifikan yang perlu diperbaiki.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fiantika, F. M. W., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI* (Issue March). Yuliatris Novita. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, evi fatmi, Istiqomah, R. R., Faedani, R. asri, Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Komang Gede Pramantara, & Widyantara. (2022). Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 182–187. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4741.182-187>
- Laary, Y., Tulus, F. M., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Administrasi Publik*, VIII.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Putra, A., Hidayat, R., & Jayanegara, O. (2024). *Analysis Of The Performance Of The Forestry Police Technical Implementation Unit Of Bukit Duabelas National Park In Area Protection And Security*. 9(1), 185–202.
- Yossyafaat, el al. (2023). Urgensi Pelindungan Satwa Dari Masifnya Kegiatan Perburuan Liar di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupatn Sleman. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(2), 204–211. <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i2.9621>